

**KEDUDUKAN KONSTITUSIONAL DALAM PENGGUNAAN
TEKNOLOGI PENGENAL WAJAH (FACE RECOGNITION
TECHNOLOGY) UNTUK PENGAWASAN PUBLIK DALAM
PERSPEKTIF SIYASAH**



DWI FITRIYANA
NIM 2011150095

**KEDUDUKAN KONSTITUSIONAL DALAM
PENGUNAAN TEKNOLOGI PENGENAL WAJAH
(*FACE RECOGNITION TECHNOLOGY*) UNTUK
PENGAWASAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF
SIYASAH**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

Dwi Fitriyana
NIM 2011150095

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO
BENGKULU TAHUN 2026**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon: (0736) 51276-51171-51172 Fax: (0736) 51171-51172
Website: www.uinfashengkulu.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Sketsa yang ditulis oleh Dwi Fitriyana, NIM : 20011150095 dengan judul
"Kedudukan Konstitusional Dalam Penggunaan Teknologi Pengenal
Wajah (Face Recognition Technology) Untuk Pengawasan Publik Dalam
Perspektif Syariah" Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah
telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan
pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam
sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 27 Juli 2026 M
Syab'an 1447 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Ifansyah Putra, M.Sos
NIP. 199303312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon: (0736) 51276-51171-51172 Fax: (0736) 51177-51172
Website: www.uinfatbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **Kedudukan Konstitusional Dalam Penggunaan Teknologi Pengenal Wajah (Face Recognition Technology) Untuk Pengawasan Publik Dalam Perspektif Syariah** oleh **Dwi Fitriyana**, NIM: 2011150095 Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang **Munagoosyah** Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:
Hari : Kamis
Tanggal : 18 Juni 2026

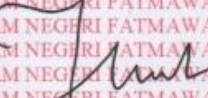
Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Hukum Tata Negara dan diberi gelar Sarjana Hukum (S.H).

Bengkulu, 27 Juli 2026 M
Safar 1448 H



Tim Sidang Munagoosyah
Ketua **Sekretaris**


Dr. Miti Yarmunida, M.Ag.
NIP. 197705052007102002


Hafsyah Putra, M.Sos.
NIP. 199303312019031005

Penguji I

Dr. Rohmadi, S.Ag., M.A.
NIP. 197103201996031001

Penguji II

Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag.
NIP. 197209222000032001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Fitriyana
Tempat,tanggal lahir : Air Batang, 22 Desember 2002
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Air Batang, kec. Nasal, kab. Kaur, Bengkulu
Nama Orang Tua/Wali : Okta Fianus

Bahwa saya telah melakukan cek plagiasi di Fakultas Syariah dan saya bertanggung jawab atas semuanya, maka saya tidak akan:

1. Saya tidak akan menuntut hasil plagiasi yang sudah saya cek.
2. Saya tidak memberikan apapun kepada tim plagiasi Fakultas Syariah.
3. Saya bertanggung jawab atas semua hasil plagiasi.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam hasil plagiasi, maka saya menerima semuanya dan bertanggung jawab atas plagiasi tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan kondisi sehat serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

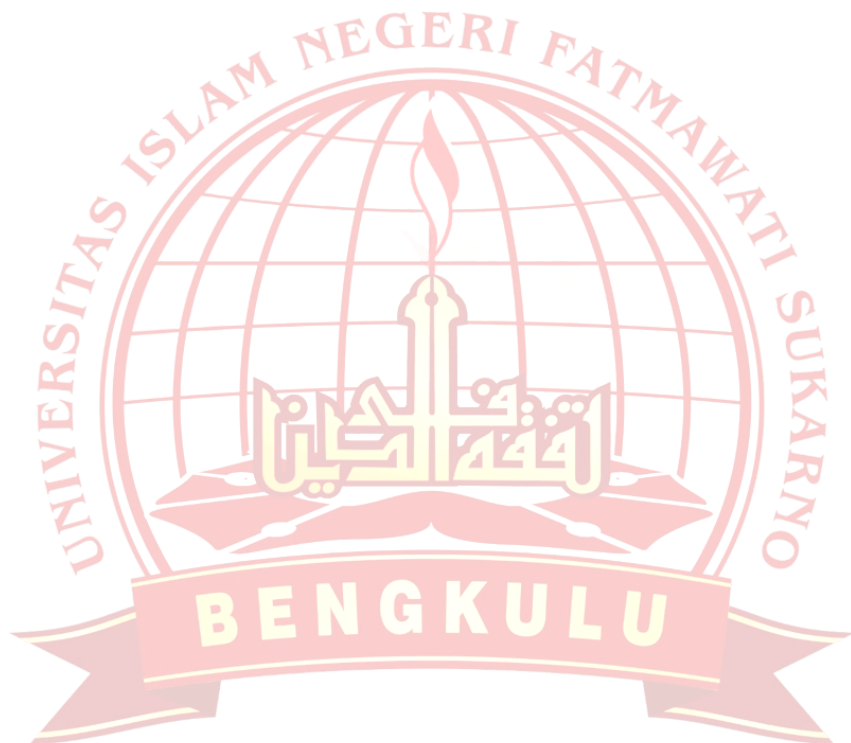
Dengan Hormat


Dwi Fitriyana

NIM.2011150059

MOTTO

“Ilmu menunjukan kebenaran akal, maka barang siapa
yang berakal, niscaya dia berilmu”
(Sayyidina Ali Bin Abi Tholib)

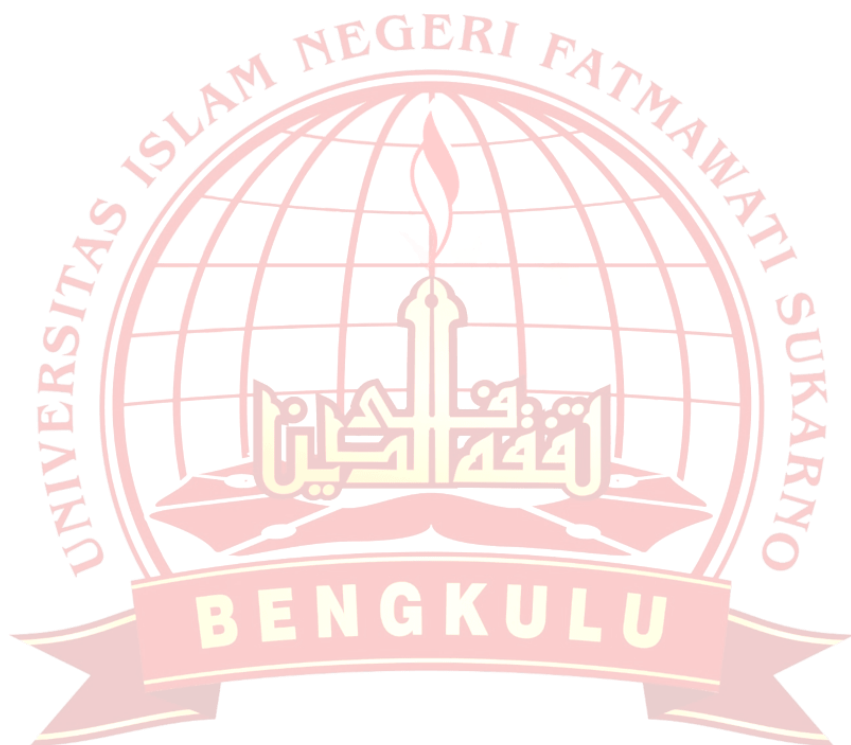


HALAMAN PERSEMBAHAN

Rasa syukur yang tak henti-hentinya saya ucapkan kepada Allah SWT yang selalu bersama saya dan memberikan pembelajaran yang sangat luar biasa dalam menyelesaikan Tugas Akhir dari perjuangan saya menggapai Gelar S.H ini. Tentunya banyak sekali dorongan dan bantuan dari orang-orang yang menyanyangi dan selalu memberikan semangat agar saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Ku persembahkan skripsi untuk orang-orang yang sangat kukasihi dan kusayangi yang selalu mendukung dan selalu ada dalam setiap langkah saya. Saya bukan apa-apa jika tanpa dukungan dan motivasi dari kalian semua. Terima kasih untuk:

1. Allah SWT Pencipta semesta alam yang telah membrikan hidup, berkah, kelancaran dan rezekinya.
2. Kedua orang tuaku, Ayahanda tercinta bapak Pianus. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupanku, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik, memotivasi serta memberikan dukungan hingga peneliti mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Dan untuk surgaku, ibu Zainawati yang dimana yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang yang penuh cinta dan selalu memberikan motivasi, semangat serta do'a yang terbaik hingga peneliti bisa menyelesaikan pendidikan sampai sarjana.
3. Dosen pembimbing skripsiku, Ibu dosen pembimbing I Dr. Miti Yarmunida, M.Ag. Dan dosen pembimbing II Bapak Ifansyah Putra, M.Sos. Yang sangat bersabar dalam membimbing dan mengarahkan skripsi ini sehingga skripsi ini terselesaikan tepat waktu.

4. Semua teman yang sudah membantu mengarahkan dan juga memberi masukan kepada saya mengenai skripsi ini. Terima kasih atas segala dukungan, motivasi, ilmu, waktu dan pengalaman selama perkuliahan. Ucapan syukur kepada Allah SWT karena sudah mempertemukan dengan kalian semua.



ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi mendorong penggunaan Teknologi Pengenal Wajah (Face Recognition Technology/FRT) dalam pengawasan publik oleh negara. Teknologi ini dinilai mampu meningkatkan keamanan dan efisiensi, namun di sisi lain menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait perlindungan hak privasi dan data pribadi warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan konstitusional penggunaan FRT dalam pengawasan publik serta mengkaji tantangan regulasi dan solusi penerapannya dalam perspektif prinsip-prinsip siyasah syar'iyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory approach), dengan menelaah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan FRT dalam pengawasan publik merupakan bentuk pembatasan terhadap hak privasi yang secara konstitusional hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi prinsip legalitas, tujuan yang sah, kebutuhan, dan proporsionalitas. Namun, belum adanya regulasi khusus mengenai FRT menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara. Dalam perspektif siyasah syar'iyah, penggunaan FRT hanya dapat dibenarkan apabila berorientasi pada kemaslahatan umum, keadilan, serta disertai mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang komprehensif agar penggunaan FRT sejalan dengan nilai keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Teknologi Pengenal Wajah, Hak Privasi, Pengawasan Publik.

ABSTRACT

*The development of information technology has encouraged the use of Face Recognition Technology (FRT) in public surveillance by the state. Although this technology is considered effective in enhancing security and efficiency, it also raises significant legal issues, particularly concerning the protection of privacy rights and personal data. This study aims to analyze the constitutional position of the use of FRT in public surveillance and to examine regulatory challenges and proposed solutions from the perspective of the principles of *siyasah syar'iyah*. This research employs a normative juridical method using a statutory approach by examining the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, and other relevant laws and legal literature. The findings indicate that the use of FRT in public surveillance constitutes a limitation on the right to privacy, which constitutionally can only be justified if it complies with the principles of legality, legitimate aim, necessity, and proportionality. However, the absence of specific regulations governing the use of FRT has led to legal uncertainty and poses potential risks to the violation of citizens' constitutional rights. From the perspective of *siyasah syar'iyah*, the use of FRT is permissible only if it is oriented toward public welfare, justice, and supported by clear supervision and accountability mechanisms. Therefore, comprehensive legal regulation is necessary to ensure that the use of FRT aligns with justice and the protection of human rights.*

Keywords: Face Recognition Technology, Privacy Rights, Public Surveillance, Constitution,

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, dengan rahmt dan hidayah-nyalah sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul “Kedudukan Konstitusional Dalam Penggunaan Teknologi Pengenal Wajah (*Face Recognition Technology*) Untuk Pengawasan Publik Dalam Persepektif Siyasah. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada:

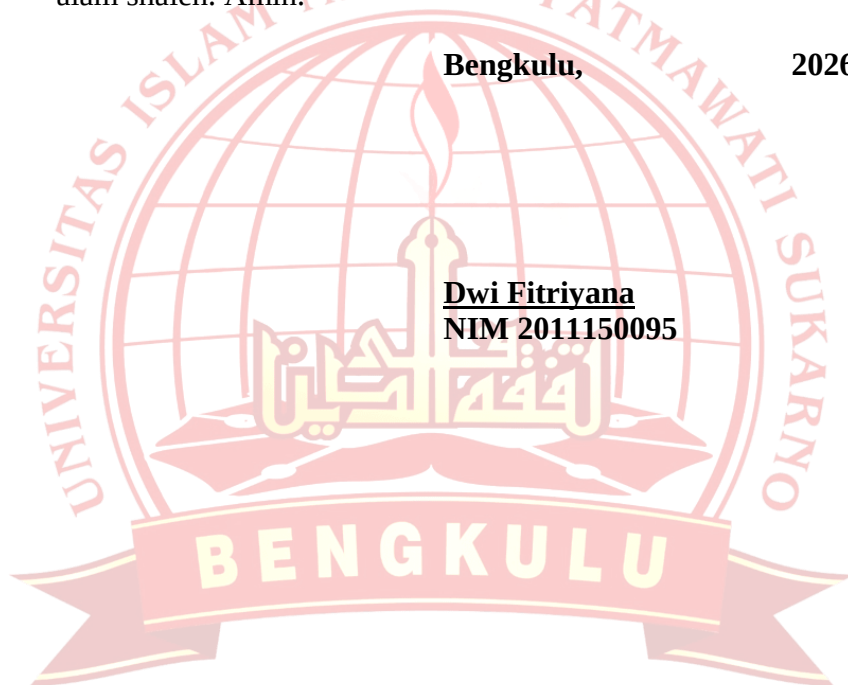
1. Prof. Dr. H. Khairuddin, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menuntut ilmu pengetahuan di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Prof. Dr. Iim Fahimah, I.C. M.A. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu beserta staf yang menyediakan fasilitas penunjang dalam proses perkuliahan.
3. Dr. Hidayat Darussalam, M.E.Sy Selaku Koordinator Prodi Hukum Tata Negara yang telah memberikan arahan dan dukungannya selama proses pembuatan proposal.
4. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag. Selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ifansyah Putra, M.Sos. Selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.
6. Dr. Syahril. Sos.I. M.Ag. Selaku Kepala perpustakaan UINFAS Bengkulu beserta staf yang telah menyediakan berbagai referensi mulai dari buku, skripsi dan lain-lain.
7. Dosen-dosen dan staff prodi HTN yang telah banyak membantu selama proses pembuatan skripsi ini. Penulis sangat menyadari sepenuhnya penyusunan skripsi ini adalah

berkat bantuan dari beberapa pihak. Untuk itu, penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak. Akhir kata, kepada Allah SWT penulis memohon semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan untuk penelitian selanjutnya, dapat berguna dan bemanfaat bagi penulis dan para pembaca. Atas segala bantuan yang tiada ternilai harganya, semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Akhirnya atas segala kebaikan semoga menjadi alam shaleh. Amin.

Bengkulu,

2026

Dwi Fitriyana
NIM 2011150095



DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Teknologi Pengenal Wajah.....	17
B. Hak Privasi dan Perlindungan Data Pribadi dalam Hukum Konstitusional	26
C. Kedudukan Hukum dan Etika dalam Penggunaan Teknologi Pengenal Wajah untuk Pengawasan Publik	30
D. Hak Privasi Individu dan Kepentingan Umum Dalam Perspektif Siyasah.....	40

BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Jenis Penelitian	57
B. Pendekatan Penelitian	57
C. Bahan Hukum	58
D. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	59
E. Pengolahan Bahan Hukum	60
F. Analisis Bahan Hukum	60
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	62
A. KEDUDUKAN KONSTITUSIONAL PENGUNAAN TEKNOLOGI PENGENAL WAJAH DALAM PENGAWASAN PUBLIK DAPAT MEMPENGARUHI HAK PRIVASI INDIVIDU DAN KEPENTINGAN UMUM DALAM KONTEKS PRINSIP-PRINSIP SIYASAH	62
B. TANTANGAN YANG DIHADAPI DAN SOLUSI YANG DAPAT DIUSULKAN UNTUK MEMASTIKAN BAHWA PENERAPAN TEKNOLOGI INI SEJALAN DENGAN NILAI- NILAI Keadilan dan Kemaslahatan Masyarakat	80
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100

DAFTAR PUSTAKA